

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yunani merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa yang menerapkan sistem ekonomi pasar. 40% dari GDP Yunani diperoleh dari sektor publik dan 18% PDB diperoleh dari sektor pariwisata.¹ Seperti negara anggota Uni Eropa lainnya, sektor jasa merupakan sektor yang sangat diandalkan bagi penggerak ekonomi Yunani. Sektor jasa ini meliputi pariwisata, hotel dan penginapan, wirausaha, administrasi publik dan telekomunikasi. Data terbaru tahun 2017 menyatakan bahwa sektor jasa menyumbang hampir 80% pada PDB nasional dan mempekerjakan 72,4% tenaga kerja.² Dalam satu tahun, diperkirakan sekitar 15 juta wisatawan internasional datang ke Yunani. Hal ini menjadikan Yunani sebagai negara peringkat ke-7 yang paling banyak dikunjungi di Uni Eropa dan peringkat ke-16 di dunia.³

Sektor industri menyumbang hampir 16% pada PDB nasional Yunani dan mempekerjakan 15% tenaga kerja. Berbagai industri yang beroperasi di Yunani antara lain pertambangan, minyak bumi, pengolahan makanan dan tembakau, produk logam, tekstil dan bahan kimia. Di sisi lain, sektor pertanian hanya menyumbang 4% terhadap PDB nasional Yunani dan menyerap 12,6% angkatan kerja di negara

¹ Index Mundi, "Greece Economy – Overview"

https://www.indexmundi.com/greece/economy_overview.html (diakses pada 19 Maret 2018).

² Central Intelligence Agency, "The World Factbook. Greece Economy"

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html> (diakses pada 19 Maret 2018).

³ Economy of Greece. <https://www.greeka.com/greece-economy.htm> (diakses pada 19 Maret 2018).

tersebut.⁴ Kurangnya sumber daya alam dan lahan yang bisa olah mengakibatkan volume hasil produksi tidak tumbuh secara signifikan. Hasil pertanian yang diandalkan adalah gandum, jagung, anggur, kentang, zaitun, tembakau dan tomat. Selain itu, juga ada daging sapi dan produk susu. Dari seluruh produk hasil pertanian, minyak zaitun merupakan komoditas ekspor nasional terbanyak selain buah-buahan.

Pada tahun 1981, Yunani menjadi negara ke-10 yang secara resmi bergabung sebagai negara anggota Uni Eropa. Selanjutnya, pada Januari 2001, Yunani menjadi negara anggota Uni Eropa ke yang mengadopsi Euro sebagai mata uang resmi, menggantikan drachma sebagai mata uang sebelumnya.⁵ Bergabungnya Yunani dalam keanggotaan Eurozone tidak membuat perekonomian Yunani membaik. Yunani mengalami kesulitan dalam mengimbangi dinamika dan kompetisi ekonomi negara-negara anggota Eurozone lainnya yang didominasi oleh negara-negara maju. Kondisi ini memaksa Yunani untuk terus mencari pinjaman kepada beberapa lembaga keuangan seperti IMF, World Bank dan negara-negara sahabat. Pinjaman ini digunakan oleh Yunani untuk membiayai subsidi, membayar gaji PNS dan dana pensiun.⁶

Sejak tahun 2000-2007, rata-rata pertumbuhan ekonomi Yunani mencapai 4.2% per tahun.⁷ Pertumbuhan ekonomi yang positif ini disebabkan oleh banyaknya

⁴ Central Intelligence Agency, "The World Factbook. Greece Economy" <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html> (diakses pada 19 Maret 2018).

⁵ Ralph C. Bryant, Nicholas C. Garganas & George S. Tavlas, "Introduction: Greece Economic Performance and Prospects". Bank of Greece & The Brookings Institution. 2001. 2.

⁶ Sarwendah Okky Liesindriyanti & Djoko Susilo, "Keputusan Uni Eropa Memberikan Financial Assistance Package kepada Yunani pada Tahun 2010" Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

⁷ Bank of Greece, "The Chronicle of the Great Crisis" (Bank of Greece, 2014). 12.

arus investasi dan modal yang masuk ke negara tersebut. Sebelum terjadinya krisis, Yunani merupakan negara yang tercatat memiliki banyak utang kepada negara-negara Eropa, seperti Perancis, Inggris, Jerman, Portugal, Italia hingga Amerika Serikat. Hingga tahun 2017, hutang Yunani tersebut tercatat sebesar €324 miliar, 193.83% dari total GDP.⁸ Jumlah tersebut merupakan akumulasi utang sejak beberapa tahun sebelum terjadinya krisis keuangan global. Hal itu dapat ditelusuri sejak tahun 2001 ketika Yunani mulai bergabung dengan keanggotaan zona euro. Setelah pergantian mata uang Drachma ke Euro, pengeluaran pemerintah Yunani meningkat secara signifikan melebihi 50% dari total GDP. 75% dari pengeluaran tersebut dialokasikan untuk menaikkan upah di sektor publik dan menaikkan tunjangan sosial.⁹ Kenaikan upah dan tunjangan ini dinilai terlalu cepat dan terlalu besar dibandingkan dengan negara-negara anggota Eurozone lainnya. Pemerintah Yunani juga menggunakan hutang tersebut untuk pembangunan infrastruktur olah raga saat menjadi penyelenggara olimpiade di Athena pada tahun 2004. Adapun dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan sekitar \$15 miliar.¹⁰ Jumlah ini merupakan pengeluaran yang cukup besar hingga berdampak terhadap stabilitas keuangan Yunani.

Jatuhnya Lehman Brothers pada tanggal 15 September 2008 diikuti oleh penurunan sistem keuangan secara global menjadi ancaman serius bagi sektor

⁸ National Debt Clocks, *National Debt of Greece*. <https://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece> (diakses pada 19 Maret 2018).

⁹ Rebecca M. Nelson, Paul Belkin & Derek E. Mix, "Greece Debt Crisis: Overview, Policy Responses and Implications", Congressional Research Service (2011). 2-3.

¹⁰ Erik R. Vickstrom, "Implosion in Greece? An Analysis of the Greek Debt Crisis and Its Impact on European and World Market", University of Illinois at Urbana-Champaign (2012). 32.

ekonomi dan keuangan dunia. Krisis keuangan ini telah mengakibatkan munculnya krisis kepercayaan di pasar keuangan global, melemahnya nilai tukar mata uang, menurunnya daya beli masyarakat, terhambatnya akses finansial, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menyadarkan masyarakat dunia tentang adanya kelemahan-kelemahan pada sistem ekonomi dan keuangan global.¹¹ Dampak dari krisis ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh Amerika Serikat, namun juga negara maju maupun negara berkembang lainnya. Krisis ini juga merambat ke beberapa negara di Eropa. Salah satu negara yang merasakan dampak akibat krisis ini adalah Yunani. Yunani merupakan negara pertama di kawasan Eropa yang terkena dampak krisis keuangan global.

Sejak krisis finansial terjadi pada tahun 2008, penerimaan pemerintah Yunani yang bersumber dari pajak mengalami penurunan karena kemampuan ekonomi masyarakat melemah dan perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan. Sektor pariwisata dan pengiriman barang yang menjadi tumpuan ekonomi Yunani mengalami penurunan pertumbuhan. Krisis ini juga berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Yunani. Menurut *Travel & Tourism Competitiveness Index*, pada tahun 2011 pariwisata Yunani menempati posisi ke-21 di antara negara-negara Uni Eropa dan posisi ke-29 di seluruh dunia.¹² Efek dari krisis ini telah mengakibatkan terjadinya

¹¹ George Alogoskoufis, "Greece's Sovereign Debt Crisis: Retrospect and Prospect", Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe (2012): 25-26.

¹² Sultana (Tania) Kapiki, "The Impact of Economic Crisis on Tourism and Hospitality: Result from a Study in Greece", Central European Review of Economic and Finance, Vol. 1. No. 2 (2011): 8.

defisit anggaran, dimana pengeluaran pemerintah lebih besar dialokasikan untuk pembayaran tunjangan sosial kepada para pengangguran sedangkan pemasukan yang diterima sangat minim yang mengakibatkan Yunani gagal membayar utangnya.

Permasalahan keuangan yang terjadi di Yunani dimulai pada tahun 2009. Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Yunani yang baru, George Papandreu mengumumkan bahwa defisit anggaran Yunani mencapai 12.7% dari PDB.¹³ Jumlah ini berbeda dengan total defisit yang diumumkan oleh perdana menteri sebelumnya, Costas Caramanlis, yang menyatakan bahwa defisit keuangan Yunani hanya 6%. Pemalsuan data keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani menyebabkan Yunani memperoleh kritik yang cukup keras dari berbagai pihak, salah satunya dari Uni Eropa. Selain itu, Yunani juga mengalami krisis kepercayaan pasar yang mengakibatkan obligasi Yunani mengalami penurunan. Defisit anggaran yang semakin membengkak dan nilai obligasi yang semakin menurun mengharuskan pemerintah Yunani melakukan penghematan anggaran untuk memotong jumlah defisit tahun 2010. Papandreu melakukan penghematan anggaran melalui pemangkasan pengeluaran di sektor publik dan menaikkan pajak dan harga bahan bakar. Akibat kebijakan ini, pada bulan Februari hingga Maret 2010, terjadi beberapa kali aksi demonstrasi dan kerusuhan yang menentang kebijakan penghematan ini. Kebijakan penghematan terus dilakukan oleh pemerintah Yunani dengan

¹³ Eki Lian Pratomo, "Latar Belakang Yunani Menyetujui Bailout dari Uni Eropa Pasca Referendum pada Tahun 2015". Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016): 3.

membekukan dana pensiun, memotong anggaran sebesar €30 miliar dan menaikkan pajak dan alkohol.¹⁴

Secara internal, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya krisis hutang pemerintah atau *sovereign debt crisis*¹⁵ di Yunani. Setelah bergabung sebagai anggota Uni Eropa dan mengadopsi Euro sebagai mata uang resmi, pengeluaran pemerintah Yunani justru meningkat dan perdagangan luar negeri didominasi oleh sektor impor dibanding ekspor.¹⁶ Tingginya pengeluaran pemerintah disebabkan oleh lemahnya sistem penyusunan dan pengawasan anggaran belanja negara dan tidak adanya tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pembuatan laporan anggaran serta ketiadaan anggaran belanja jangka menengah.¹⁷ Selain itu, pemerintah Yunani juga menghabiskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan produktivitas berkelanjutan, salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur Olimpiade tahun 2004.¹⁸

Di sektor perbankan, bank negara banyak memberikan subsidi untuk bisnis yang kurang menghasilkan profit. Pemerintah Yunani juga menghabiskan anggaran

¹⁴ Council on Foreign Relations. "Greece's Debt", <https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline>

(diakses pada 19 Maret 2018).

¹⁵ *Sovereign debt crisis* adalah suatu permasalahan ekonomi yang terjadi akibat ketidakmampuan negara tersebut dalam membayar hutang-hutangnya. Kondisi ini dapat terjadi apabila suatu negara memiliki hutang yang cukup banyak dan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah.

¹⁶ Pantelis Sklias & George Galatsida, "The Political Economy of the Greek Crisis: Roots, Causes and Perspective for Sustainable Development. Euro Journals Publishing, Inc, 2010: 169

¹⁷ Georgia Kaplanaglou & Vassilis T. Rapanos, "The Greek Fiscal Crisis and the Role of Fiscal Governance", GreeSE Paper No. 48 Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economic and Political Science. 2011: 22-24

¹⁸ Boy Yusuf Pane, "Kegagalan Yunani Memanfaatkan Bailout dalam Upaya Mengatasi Krisis Ekonomi Tahun 2008" Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2012: 4-5

untuk militer dan pertahanan. Hingga tahun 2016, Yunani tercatat telah menghabiskan €4.155 juta atau 2.38% dari total GDP untuk anggaran pertahanan. Yunani merupakan negara anggota NATO yang memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua setelah Amerika Serikat.¹⁹ Yunani juga mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembayaran upah dan dana pensiun. Sepanjang tahun 2000-2008, kenaikan alokasi dana untuk gaji pemerintah naik hingga 100%. Sedangkan dana pensiun Yunani adalah 97.5% dari total pendapatan seumur hidup. Dana pensiun Yunani merupakan yang tertinggi di wilayah Eurozone.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya inefektifitas penggunaan anggaran dan pengeluaran yang cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah Yunani.

Selain itu, *sovereign debt crisis* yang terjadi di Yunani terjadi akibat maraknya korupsi dan penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian pada anggaran negara. Yunani merupakan negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Eropa. Praktek korupsi ini mengakibatkan Yunani mengalami kerugian sebesar 8% dari PDB setiap tahunnya.²¹ Selain korupsi, sistem pemungutan pajak yang buruk menjadi salah satu penyebab rendahnya pemasukan pemerintah Yunani. Wajib pajak seperti perusahaan besar, perbankan, pemerintah hingga masyarakat sipil melakukan kecurangan dan pemalsuan data agar terhindar dari kewajiban membayar pajak. Di Yunani, pajak hanya dipungut dari masyarakat golongan atas, yang berpenghasilan di atas 12.000 Euro per tahun dimana populasinya sangat kecil.²²

¹⁹ NATO Press Release, "Defence Expenditure of NATO Countries (2009-2016)", 2016.

²⁰ Boy Yusuf Pane., Op. Cit., 6.

²¹ Steven Panageotou, "A Critical Literature Review of the Greek Financial Crisis" (2011): 5.

²² Georgia Kaplanaglou & Vassilis T. Rapanos. Op, Cit, 30-32.

Yunani merupakan negara yang tercatat beberapa kali mengalami kegagalan dalam membayar hutang-hutangnya, yaitu pada tahun 1843, 1860, 1894, 1931 dan 2008.²³ Adapun hutang-hutang tersebut digunakan untuk beragam kepentingan, yaitu untuk keperluan membayar hutang, rekonstruksi pasca perang hingga pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di wilayah pedesaan maupun di perkotaan. Negara-negara yang menjadi kreditur bagi Yunani antara lain Inggris, Perancis, Jerman serta lembaga-lembaga keuangan internasional.²⁴ Pertumbuhan ekonomi Yunani yang lambat menyebabkan Yunani sulit memperoleh dana untuk melunasi hutang-hutangnya.

Selain faktor internal di atas, terdapat faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis di finansial Yunani, yaitu krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008. Efek krisis keuangan global mengakibatkan rendahnya arus investasi yang masuk ke Yunani akibat berkurangnya kepercayaan investor. Faktor lainnya adalah adanya kemudahan memperoleh pinjaman hutang negara anggota Eurozone dan kebijakan Uni Eropa yang kurang tegas dalam mengawasi jumlah pinjaman anggotanya menyebabkan negara tersebut melanggar batas pinjaman yang telah ditetapkan oleh SGP (*Stability Growth Pact*). SGP merupakan sebuah panduan yang diterapkan kepada negara-negara anggota *Eurozone* untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi serta sebagai wadah untuk mengatur kebijakan-kebijakan fiskal. Penerapan SGP ini berguna untuk mengatur penganggaran setiap negara

²³ Triesanto Romulo Simanjuntak & Tunjung Wijanarka, "Masa Depan Uni Eropa Setelah Krisis Yunani" Universitas Kristen Satya Wacana: 2.

²⁴ Ioanna Zikakou, "Greece's History of Loans Since 1824" <http://greece.greekreporter.com/2015/08/11/greeces-history-of-loans-since-1824/> (diakses pada 20 Maret 2018).

anggota agar tetap disiplin dan stabil.²⁵ Tumpukan hutang Yunani merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan tindakan indisiplin terhadap SGP.

Krisis di Yunani menyebabkan terjadinya ketidakstabilan situasi politik, ekonomi maupun sosial di negara tersebut. Di bidang politik, kebijakan yang diterapkan oleh Papanderou dianggap tidak membawa perubahan pada kondisi perekonomian Yunani. Pada tanggal 6 November 2011, Papanderou memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri Yunani saat itu dan digantikan oleh Lucas Papademos. Lucas Papademos ditunjuk sebagai perdana menteri sementara untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Pergantian kepemimpinan ini tidak terlepas dari tekanan negara-negara anggota Eurozone terhadap Yunani untuk melakukan reformasi ekonomi mengingat efek domino yang ditimbulkan apabila krisis tersebut tidak segera ditanggulangi.²⁶

Sedangkan di bidang ekonomi, krisis Yunani menyebabkan angka pengangguran pada tahun 2013 mencapai 27% dan angka pengangguran di usia muda mencapai 50%. Tingginya angka pengangguran ini menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk Yunani secara massif dengan tujuan agar memperoleh pekerjaan yang layak. Krisis ini juga telah mengakibatkan meningkatnya rasio utang Yunani, menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan menurunnya performa perdagangan luar negeri Yunani. Krisis ini juga telah menyebabkan beberapa perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Yunani, seperti meningkatnya angka

²⁵ Jost Angerer, "Stability and Growth Pact – An Overview of the Rules" European Parliament Directorate-General for Internal Policies Economic Governance Support Unit (2015).

²⁶ Humphrey Wangke, "Krisis Utang di Zona Euro" Info Singkat Hubungan Internasional Vol. III, No. 22/II/P3DI/November (2011): 6.

kemiskinan, orang-orang kehilangan tempat tinggal hingga menyebabkan mereka harus tinggal di jalanan.²⁷

Sebagai sebuah institusi kerja sama regional yang mewadahi keanggotaan negara-negara Eropa, Uni Eropa dan badan moneternya berperan dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani. Adanya saling ketergantungan antara Uni Eropa dan Yunani membuat Uni Eropa mengambil tindakan untuk memberikan bantuan kepada Yunani. Uni Eropa menyadari bahwa krisis yang terjadi di Yunani akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi di kawasan tersebut. Sebagai kawasan yang menerapkan sistem mata uang tunggal, keamanan dan stabilitas ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, negara-negara anggota Uni Eropa dan *Eurozone* menganggap bahwa mereka perlu membantu penanganan ekonomi Yunani karena adanya kekhawatiran mengenai aset dan investasi yang mereka tanamkan di Yunani selama ini akan hilang. Beberapa negara Eropa yang menanamkan modalnya di Yunani saat ini antara lain Jerman, Perancis, Belanda dan Italia. Kekhawatiran ini yang akhirnya menggerakkan negara-negara anggota Uni Eropa memberikan bantuan dana talangan untuk membantu pemulihan ekonomi Yunani.²⁸

Sejak terjadinya krisis, Yunani tercatat telah menerima 3 kali bantuan dana pinjaman, baik dari Uni Eropa maupun dari IMF. Bantuan keuangan yang diberikan oleh Uni Eropa dan IMF seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Yunani untuk menstabilkan kembali sistem keuangan di negara tersebut serta meredam

²⁷ George Petrakos, "Economic Crisis in Greece. European and Domestic Market and Policy Failure" *Region et Development* n 39 (2014): 11-12.

²⁸ Sarwendah Okky Liesindriyanti, Djoko Susilo. *Op. Cit.*, 6-7.

kekhawatiran pasar akan keruntuhan Uni Eropa. Dana talangan yang dipinjamkan oleh Uni Eropa dan IMF digunakan untuk menutupi hutang-hutang sebelumnya. Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa situasi perekonomian di negara tersebut semakin memburuk dimana pertumbuhan ekonomi semakin menurun dan angka pengangguran lebih dari 25%.²⁹ Krisis hutang yang dihadapi oleh Yunani saat ini mengakibatkan Yunani tenggelam pusaran hutang-hutangnya.

Pada akhirnya, krisis hutang ini tidak hanya melanda Yunani, namun juga terjadi pada beberapa negara Eropa lainnya, seperti Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Krisis yang melanda negara-negara Uni Eropa disebabkan oleh kurangnya kerangka kerjasama institusi dalam zona Euro. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya serikat fiskal, kurangnya sistem kelembagaan untuk mengawasi bank-bank Eropa, serta kegagalan Uni Eropa dan lembaga moneternya dalam memantau situasi ekonomi negara-negara anggota Euro.³⁰ Krisis finansial ini tidak hanya menjadi bencana hutang yang mengancam perekonomian Yunani, namun juga merupakan pukulan bagi sistem mata uang tunggal Uni Eropa. Anggapan bahwa Uni Eropa yang selama ini dianggap sebagai institusi kawasan yang stabil dan ideal pun mulai dipertanyakan.

Selain itu, beberapa tahun sejak semakin parahnya krisis finansial di Yunani, muncul wacana keluarnya Yunani dari kenggotaan Uni Eropa yang dikenal dengan istilah Grexit. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan bahwa apabila Yunani keluar

²⁹The New York Times. "Explaining Greece's Debt Crisis"
<https://www.nytimes.com/interactive/2016/business/international/greece-debt-crisis-euro.html> (diakses pada 20 Maret 2018).

³⁰ Dr. Philippos Sachinidis dalam pidatonya yang berjudul "Lesson from the Greek Crisis" yang disampaikan pada 27 Januari 2017 di American College of Athens
<http://todiktio.eu/en/index.php/activities/publications-reports-policy-briefs/item/448-lessons-from-the-greek-crisis> (diakses pada 20 Maret 2018).

dari keanggotaan Uni Eropa, maka prospek pertumbuhan ekonomi Yunani akan membaik. Namun, Dr. Philippos Sachinidis berpendapat bahwa apabila Yunani keluar dari keanggotaan Uni Eropa, maka hal tersebut akan semakin mempertajam ketimpangan ekonomi antara Yunani dan negara Eropa lainnya. Transisi penggunaan mata uang Euro ke Drachma akan menyebabkan turunnya standar hidup masyarakat Yunani karena pendapatan riil mereka akan menurun. Golongan masyarakat yang akan diuntungkan dengan adanya transisi mata uang ini hanyalah masyarakat yang memiliki aset di luar negeri.³¹

1.2 Rumusan Masalah

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 telah menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Salah satu negara yang terkena dampak krisis ini adalah Yunani. Krisis finansial global perlahan-lahan mengguncang perekonomian Yunani. Sektor pariwisata dan pengiriman barang di Yunani terkena dampak dari krisis finansial global tahun 2008. Kedua sektor ekonomi ini mengalami penurunan pertumbuhan yang mengakibatkan berkurangnya pemasukan pemerintah Yunani. Selain itu, pengelolaan sistem keuangan negara yang kurang baik oleh pemerintah, termasuk adanya kecurangan dan tidak adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan negara merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis di Yunani. Tidak seimbangny pemasukan dan pengeluaran anggaran negara menyebabkan pemerintah Yunani mengalami kewalahan untuk melunasi utang-utangnya.

³¹ Ibid

Dana talangan ini diharapkan mampu mengembalikan stabilitas ekonomi Yunani serta mencegah meluasnya krisis ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Namun, dana talangan tersebut justru membuat situasi ekonomi dan keuangan di Yunani semakin memburuk. Krisis pun mulai meluas ke beberapa negara lainnya, seperti Portugal, Spanyol, Irlandia, dan Italia. Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa yang juga menggunakan Euro sebagai mata uangnya, krisis finansial yang terjadi di Yunani tentunya menjadi ancaman bagi stabilitas perekonomian di kawasan Eropa. Tidak hanya itu, krisis yang terjadi di Yunani dikhawatirkan menjadi ancaman bagi keberlangsungan integrasi Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa memandang perlunya sebuah langkah dan kebijakan untuk memulihkan kembali situasi perekonomian Yunani. Beberapa negara khawatir krisis ini akan menyebabkan hilangnya aset-aset ekonomi dan investasi negara anggota Eurozone yang tertanam di Yunani.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang hendak dijawab oleh peneliti adalah: “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di Yunani pada tahun 2008-2017?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komperhensif mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menangani krisis ekonomi Yunani pada saat krisis finansial melanda negara tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan sekaligus menambah sumber kepustakaan dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya terkait dengan kajian bagaimana sebuah institusi kerjasama internasional berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara anggotanya. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk isu yang sama.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada beberapa penelitian yang serupa dan terkait dengan pembahasan yang sedang dikaji. Studi pustaka ini dilakukan untuk membanding antara penelitian-penelitian terdahulu yang serupa sehingga peneliti dapat menemukan perbedaan dalam setiap penelitian. Selain itu, kajian pustaka ini diharapkan dapat memperkaya bahasan peneliti.

Jawik Purnami dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Uni Eropa dalam Menangani Krisis Finansial Spanyol” menjelaskan bagaimana krisis finansial yang terjadi di Spanyol telah mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara Uni Eropa. Krisis ini terjadi pada tahun 2008 dimana krisis ekonomi global yang terjadi telah menyebabkan lemahnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran di Spanyol. Di tingkat regional, krisis finansial Spanyol ini menyebabkan nilai mata uang euro mengalami fluktuasi negatif. Hal ini menyebabkan Uni Eropa mengambil kebijakan untuk menangani krisis finansial tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Spanyol untuk memulihkan perekonomian negara tersebut. Pada tanggal 8 Juni 2012, pemerintah Spanyol secara resmi meminta bantuan finansial kepada Uni Eropa. Permintaan bantuan ini disetujui dimana Spanyol memperoleh bantuan keuangan sebesar €100 miliar untuk memperkuat sistem perbankannya. Pada tanggal 3 Desember 2012, Spanyol kembali mengajukan permohonan bantuan kepada Uni Eropa sebesar €39.5 miliar untuk memperbaiki neraca keuangannya. Selain memberikan bantuan keuangan, Uni Eropa juga membantu Spanyol dalam merestrukturisasi kembali perbankannya. Dalam penyaluran bantuan ini, Uni Eropa mengoperasionalkan *European Financial Stability Facility* (EFSF) dan *European Stability Mechanism* (ESM). Dalam proses pemberian dana talangan kepada Spanyol, Uni Eropa mengajukan syarat-syarat yang mengharuskan Spanyol untuk melakukan pengetatan kebijakan ekonomi.³²

Krisis finansial yang terjadi di negara-negara Asia pada tahun 1997 telah menyebabkan guncangan ekonomi di beberapa negara, salah satunya adalah Korea Selatan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Lauren Rodier dengan judul "*Assesing the Role of the IMF in South Korea during the Asian Financial Crisis*"³³ dinyatakan bahwa sebelum krisis, Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat, ditopang oleh cadangan devisa yang melimpah. Pada saat itu, Korea Selatan menjadi negara dengan peringkat ekonomi terbesar ke-11 di dunia dan ketiga terbesar di Asia. Sayangnya, Korea Selatan juga

³² Jawik Purnami, "Upaya Uni Eropa dalam Menangani Krisis Finansial Spanyol". eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman (2013).

³³ Lauren Rodier, "Assesing the Role of the IMF in South Korea during the Asian Financial Crisis" Journal of Economics and Development Studies, Vol 2, No. 2 American Research Institute for Policy Development 2014

menghadapi beberapa permasalahan seperti tingginya angka hutang luar negeri, lemahnya regulasi keuangan di negara tersebut hingga kurangnya BUMN yang pada akhirnya menyebabkan Korea Selatan terkena dampak krisis keuangan tahun 1997.

Melihat krisis yang melanda Korea Selatan, IMF menawarkan dana bantuan kepada Korea Selatan sebesar US\$58 juta. Bantuan ini merupakan dana talangan terbesar yang diberikan oleh IMF kepada negara Asia Timur. Bantuan ini mensyaratkan Korea Selatan untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi, seperti penghematan anggaran keuangan negara serta menerapkan sistem liberalisasi modal dan perdagangan. IMF juga memberlakukan kebijakan pada setiap bank di Korea Selatan untuk menganut sistem perbankan yang sesuai dengan standar perbankan yang diterapkan di negara-negara barat.

Lauren Rodier memberikan kesimpulan pada tulisannya bahwa terdapat beberapa keuntungan pada kebijakan moneter yang diterapkan oleh IMF dalam menangani krisis di Korea Selatan. Sayangnya, hal ini harus dibayar mahal oleh adanya kerugian sosial yang terjadi di negara tersebut, seperti meningkatnya angka pengangguran dan tingginya disparitas antara si kaya dan si miskin. Ketika pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan bagi sebuah negara, hal tersebut tidak selalu dapat dijadikan sebagai sebuah indikator *quality of life*. IMF telah mengakui adanya kegagalan dalam penanganan krisis finansial di Asia yang mengindikasikan bahwa penanganan tersebut hanya bertujuan untuk meningkatkan fungsinya sebagai lembaga keuangan dalam rangka mencapai tujuannya.³⁴

³⁴ Ibid.

Dampak yang ditimbulkan krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 menyebabkan terjadinya ketidakstabilan situasi ekonomi di lima negara di kawasan Eropa hingga tahun 2009. Hal ini diungkapkan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Martin Schutz dengan judul “*The European Financial Crisis: Analysis and A Novel Intervention*”. Martin mulai menjabarkan bahwa dampak dari krisis yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa dapat terlihat dari tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh kolapsnya beberapa perusahaan sehingga terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja secara masif. Krisis finansial global juga telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, berkurangnya penerimaan pajak hingga menyebabkan defisit anggaran belanja negara.

Terjadinya krisis juga dapat disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan. Pengetahuan tentunya akan mempengaruhi tindakan masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Tindakan-tindakan yang tidak tepat dalam pengelolaan keuangan bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis. Martin menyebutkan bahwa apa yang dibutuhkan Uni Eropa untuk menangani krisis saat ini adalah dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pengembangan kapasitas dalam memecahkan masalah yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional hingga regional. Menurutnya, Uni Eropa memiliki struktur yang solid tapi hal tersebut kurang dimanfaatkan dalam kerjasama antar negara.

Disamping itu, kekuatan Uni Eropa saat ini juga bergantung pada kemampuan generasi muda untuk memecahkan masalah-masalah yang ada.³⁵

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 berkaitan erat dengan munculnya kepanikan hingga kolapsnya beberapa lembaga keuangan dan investasi di Amerika Serikat dan Eropa. Kepanikan mencakup kerugian yang cukup signifikan di sektor finansial yang menyebabkan kekacauan di pasar keuangan internasional, jatuhnya harga saham, kacaunya nilai tukar mata uang hingga terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang menyebabkan ancaman resesi ekonomi di beberapa negara. Ebru Terazi dan Secil Senel dalam penelitiannya yang berjudul “*The Effects of the Global Financial Crisis on the Central and Eastern European Union Countries*” menyatakan bahwa sebagian besar krisis ekonomi yang terjadi pada abad 19 dan 20 berkaitan dengan aktifitas ekonomi yang terjadi di sektor perbankan, adanya ledakan aset keuangan dan komoditas ekonomi tertentu. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat yang gejalanya telah terlihat sejak pertengahan tahun 2007 telah dirasakan dampaknya di hampir seluruh negara di dunia pada September 2008. Krisis ini telah mempengaruhi aktifitas ekonomi di hampir seluruh dunia dimana intensitas dan kekuatan krisis ini lebih kuat dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1930 dan krisis yang melanda Asia Timur pada tahun 1997.³⁶

Ebru dan Senel menemukan fakta bahwa krisis finansial ini secara signifikan sangat mempengaruhi negara-negara anggota baru Uni Eropa, seperti Republik Ceko,

³⁵ Martin Schutz, “The European Financial Crisis: Analysis and A Novel Intervention”, Harvard University (2014): 1-25.

³⁶ Ebru Terazi dan Secil Senel, ”The Effects of the Global Financial Crisis on the Central and Eastern European Union Countries”. International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 17.

Estonia, Latvia, Lithuania, Hungaria, Polandia, Slovenia, Rumania, Slovakia dan Bulgaria. Negara-negara tersebut merupakan negara anggota Uni Eropa dengan yang memiliki derajat kekuatan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara anggota lainnya, khususnya negara-negara Eropa Barat. Krisis yang terjadi telah menjadi tantangan baru bagi Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Beberapa negara terlihat tidak siap untuk menghadapi krisis sehingga menyebabkan lembaga-lembaga keuangan internasional harus memberikan bantuan dana talangan untuk menyelamatkan situasi ekonomi di negara-negara tersebut. Adanya perbedaan karakteristik ekonomi dan tujuan kebijakan ekonomi setiap negara ikut menentukan bentuk tindakan yang diambil untuk mengatasi krisis.

Uni Eropa sebagai sebuah institusi resmi yang mewadahi kerja sama negara-negara di kawasan Eropa juga bertanggung jawab secara hukum dan politik atas permasalahan yang muncul di kawasan tersebut, termasuk krisis finansial yang terjadi di Yunani. Dalam penelitian Sarwendah Okky Liesindriyati dan Djoko Susilo yang berjudul *Keputusan Uni Eropa Memberikan Financial Assistance Package kepada Yunani Tahun 2010* dijabarkan beberapa alasan yang melatarbelakangi Uni Eropa memberikan bantuan kepada Yunani untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Menurutnya, adanya faktor saling ketergantungan antara Yunani dan Uni Eropa merupakan salah satu alasan yang mendasari pemberian bantuan tersebut. Hal ini

disebabkan karena krisis Yunani akan menimbulkan efek domino yang dapat mengancam stabilitas perekonomian di kawasan Eropa.³⁷

Selain itu, Uni Eropa juga mengkhawatirkan hilangnya aset ekonomi mereka di Yunani. Aset-aset ekonomi itu berupa modal, hilangnya devisa akibat arus ekspor-impor yang tidak lancar. Adapun negara-negara anggota Uni Eropa yang paling banyak menanamkan modalnya di Yunani adalah Jerman, Perancis, Inggris, Belgia, Luxemburg, Belanda, dan Italia. Oleh karena itu, negara-negara anggota Uni Eropa mendesak lembaga keuangan Uni Eropa untuk memberikan bantuan dana talangan untuk menanggulangi krisis yang terjadi di Yunani. Selain desakan dari pihak internal, pihak eksternal seperti Amerika Serikat, China, Arab Saudi juga mendesak agar Uni Eropa segera melakukan tindakan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Yunani. Pasalnya, negara-negara tersebut juga menginvestasikan modalnya di Yunani di sektor-sektor yang cukup penting, seperti telekomunikasi, transportasi, pariwisata, logistic dan di sektor energi.

Kelima studi pustaka di atas merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Studi pustaka tersebut memiliki kesamaan dalam beberapa aspek pembahasan. Pertama, krisis finansial yang terjadi di beberapa negara di Eropa merupakan efek domino dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat. Krisis finansial yang Amerika Serikat terjadi akibat kredit macet property, sedangkan krisis yang melanda negara anggota Uni Eropa disebabkan oleh adanya defisit anggaran belanja negara. Aspek kedua adalah fakta yang menunjukkan bahwa krisis ekonomi maupun

³⁷ Sarwendah Okky Liesindriyati, Djoko Susilo, Op. Cit., 7

krisis finansial merupakan ancaman bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Krisis finansial yang terjadi menandakan adanya ketidakefektifan penerapan kebijakan finansial terhadap negara anggota Eurozone. Selain itu, krisis yang terjadi menandakan adanya kelemahan pada sistem finansial di kawasan tersebut. Ancaman bagi integrasi Uni Eropa tidak terlepas dari adanya faktor saling ketergantungan dan keterikatan sistem ekonomi di kawasan Uni Eropa, salah satunya melalui penggunaan mata uang Euro.

Aspek ketiga adalah adanya upaya yang dilakukan oleh institusi resmi dan lembaga keuangan internasional dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi. Di tingkat internasional, lembaga keuangan internasional seperti IMF berperan penting dalam menanggulangi krisis ekonomi maupun krisis finansial di suatu negara. Sedangkan di tingkat regional, seperti di kawasan Eropa, *European Commission* dan *European Central Bank* merupakan institusi yang berperan penting dalam proses penanggulangan krisis. Aspek ini merupakan poin penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Keterlibatan lembaga keuangan dan sebuah institusi moneter dalam upaya penanggulangan krisis tentu saja tidak terlepas dari kepentingan yang hendak dicapainya.

Aspek ke empat adalah adanya kesamaan bahwa krisis finansial yang melanda negara-negara Eropa turut mempengaruhi situasi dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Negara-negara yang terkena dampak krisis pada umumnya adalah negara peri-peri yang kekuatan ekonominya tidak sekuat negara-negara Eropa Barat. Beberapa negara bahkan terlihat tidak siap untuk menghadapi krisis sehingga memerlukan bantuan dari Uni Eropa dan lembaga keuangan internasional.

Keterlibatan Uni Eropa dalam menanggulangi krisis adalah bentuk tanggung jawab Uni Eropa sebagai institusi yang mewadahi kerjasama di kawasan tersebut serta adanya kepentingan untuk menyelamatkan aset-aset ekonomi yang ada di negara yang terdampak krisis. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis yang terjadi di Yunani berdasarkan kerangka kerja penanganan krisis yang dibuat oleh Uni Eropa.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Krisis Finansial

Istilah krisis finansial sangat erat kaitannya dengan kepanikan bank dan resesi ekonomi. Kindleberger dalam bukunya “*Manias, Panic and Crashes: A History of Financil Crisis*” menyatakan bahwa krisis finansial muncul secara spontan sebagai akibat dari adanya kepanikan yang terjadi pada sistem keuangan.³⁸ Namun, secara historis, krisis finansial sangat erat kaitannya dengan siklus alamiah sebuah sistem ekonomi. Sebuah siklus ekonomi, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan mengalami 2 fase penting, yaitu perkembangan dan resesi. Menurut Kindleberger, guncangan yang terjadi dalam sistem finansial akan berdampak terhadap kemunculan kebijakan-kebijakan baru atau perubahan menimbulkan

³⁸ Charles P. Kindleberger & R. Z. Aliber, “*Manias, Panic and Crashes: A History of Financil Crisis*” Palgrave Macmillan. 2011.

perubahan pada sistem moneter yang sudah ada. Secara umum, krisis finansial dapat dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu:³⁹

a. Krisis perbankan

Krisis perbankan adalah krisis finansial yang mempengaruhi aktivitas perbankan dalam mengatur asset dan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada investor maupun nasabahnya. Selama krisis, bank akan mengalami situasi yang disebut dengan *bank run*, dimana para nasabah dan pemilik modal melakukan penarikan dana tabungan dan modal mereka dari bank tersebut secara besar-besaran. Tindakan ini dilakukan karena adanya kepanikan yang terjadi di pasar finansial yang menyebabkan para nasabah dan pemilik modal menganggap bahwa bank akan mengalami kebangkrutan sehingga ada ketakutan terhadap hilangnya dana yang mereka simpan di bank tersebut. Karena dianggap sebagai institusi penting dalam sistem perekonomian, maka saat terjadinya krisis bank biasanya akan memperoleh bantuan dari pemerintah melalui suntikan likuiditas sementara maupun pembentukan kebijakan atau program yang bertujuan untuk melindungi sistem perekonomian.

b. *Speculative Bubbles and The Market Failure*

Speculative bubbles mengacu pada pergerakan harga sekuritas atau saham yang naik di atas nilai sebenarnya. Pergerakan harga ini dipicu

³⁹ Arbana Sahiti dkk, "Types of Financial Crisis" Asian Journal of Business and Management Science Vol. 2 No. 12. 31.

oleh spekulasi-spekulasi yang ada di pasar keuangan. Tren kenaikan harga surat-surat berharga ini akan terus berlanjut hingga investor percaya bahwa harga tersebut tidak terhubung dengan nilai riil yang ada di pasar keuangan. Para investor kemudian akan membeli saham karena mereka yakin harga saham akan terus naik. Lazimnya yang terjadi di pasar keuangan adalah harga-harga instrumen pasar keuangan menjadi anjlok. Keadaan anjloknya harga merupakan fase pechnya gelembung. Adanya gelembung spekulatif dapat meningkatkan peluang kegagalan pasar karena. Krisis ini pernah terjadi beberapa kali, diantaranya Dutch Tulip Bubble (1673), Missisipi Bubble (1719-1720), South Sea Bubble (1729), Bull Market (1924-1929) dan Japanese Economic Bubble (1984-1989).

c. *International Financial Crisis*

Krisis finansial global yang muncul di beberapa negara telah menyebabkan kekacauan sistem ekonomi, politik dan sosial. Peran pemerintah dalam krisis finansial global sangat penting untuk menstabilkan kembali sistem ekonomi di negara yang dilanda krisis. Krisis finansial ini dapat diakibatkan oleh adanya devaluasi mata uang dan kegagalan negara membayar utangnya hingga menyebabkan negara tersebut bangkrut. Sejak tahun 1980, terdapat beberapa kali krisis finansial global yang terjadi, diantaranya krisis finansial yang melanda negara-negara di Asia, krisis finansial di Rusia dan krisis yang melanda beberapa negara Uni Eropa.

d. *Broad Economic Crisis*

Broad Economic Crisis merupakan krisis finansial dengan dimensi yang lebih luas dan menciptakan kepanikan ke berbagai negara di dunia. Krisis ini menyebabkan banyak bisnis besar dengan skala internasional mengalami kegagalan. Krisis ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif di suatu negara selama lebih dari dua kuartal berturut-turut. Situasi ini disebut resesi. Sedangkan apabila negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam periode yang cukup lama, maka hal ini mengacu pada situasi depresi. Secara historis, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akan diikuti dengan peningkatan angka pengangguran di seluruh sector ekonomi. Krisis finansial ini pernah terjadi beberapa kali diantaranya Great Depression (1930) dan krisis kredit perumahan di Amerika Serikat (2007-2009).

Kindleberger dalam bukunya *The World in Depression, 1929-1939* menjabarkan 3 aspek penting mengenai krisis finansial, yaitu:

a. Kepanikan di pasar keuangan

Kindleberger mendefinisikan kepanikan sebagai goncangan yang muncul secara tiba-tiba dan tanpa sebab. Kepanikan ini merupakan tahapan awal dan memainkan peran penting dalam memicu krisis. Kepanikan ini juga menunjukkan bahwa agen ekonomi tidak bertindak rasional seperti yang diasumsikan oleh teori-teori ekonomi yang ada. Adapun tahapan terjadinya krisis finansial adalah diawali dengan

adanya gangguan pada sistem finansial, kemudian diikuti oleh adanya kesulitan situasi finansial, munculnya kepanikan, terjadinya perubahan situasi ekonomi akibat krisis dan menyebabkan jatuhnya sistem ekonomi dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

b. *The Power of Contagion*

Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1931 merupakan krisis keuangan yang berubah dari resesi menuju bencana ekonomi terbesar abad ke-20. Kindleberger menjabarkan bahwa krisis ini dimulai di Wina kemudian menjalar hingga ke Berlin, London hingga New York. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis finansial dapat menjalar secara instan akibat adanya keterkaitan finansial antar negara. Penularan krisis ini semakin parah akibat tidak adanya tindakan yang efektif untuk mencegah penyebarannya. Menurut Kindleberger, krisis finansial yang terjadi didominasi oleh krisis internasional.

c. Pentingnya Stabilitas Hegemoni

Pentingnya hegemoni diartikan sebagai kebutuhan terhadap power yang lebih kuat yang dapat mempengaruhi tindakan maupun keputusan aktor lain yang posisinya lebih tinggi dari negara bangsa lainnya. Kindleberger menyatakan bahwa krisis yang terjadi di Eropa tahun 1920 dan 1930an diakibatkan oleh kekosongan hegemoni. Hal ini kemudian dirumuskan oleh Kindleberger dalam teorinya yang disebut sebagai teori stabilitas hegemoni. Teori stabilitas hegemoni merupakan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis peran

sebuah kekuatan hegemoni serta hubungannya terhadap kebijakan dan stabilitas ekonomi politik dalam sebuah sistem internasional. Poin penting dalam teori ini adalah adanya suatu power hegemoni yang mendominasi dalam sistem internasional berfungsi untuk memastikan kestabilan situasi politik maupun ekonomi.⁴⁰ Power hegemoni ini berperan sebagai stabilisator dan merupakan kekuatan terkuat diantara negara-negara lainnya. Power hegemoni ini juga berperan sebagai pembuat aturan, menjamin keamanan serta memiliki hak untuk memberikan hukuman terhadap pihak yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kehadiran sebuah power hegemoni dalam sistem internasional tidak secara otomatis menjamin adanya stabilitas. Namun, kehadirannya dibutuhkan sebagai “*leader*” yang tidak hanya mementingkan diri sendiri namun juga berperan dalam melindungi kepentingan anggota lainnya. Sebuah negara dapat menjadi kekuatan hegemoni ketika negara tersebut telah kuat dan stabil dalam aspek ideologi, institusi, politik, militer dan ekonomi. Kindleberger menyatakan pentingnya sebuah power hegemoni untuk mempengaruhi negara-negara lainnya. Pada saat terjadi krisis finansial, power hegemoni dapat berperan sebagai penyedia likuiditas bagi negara yang mengalami krisis.

⁴⁰ Charles P. Kindleberger, “Dominance and Leadership in the International Economy: Exploitation, Public Goods, and Free Riders,” *International Studies Quarterly*, Vol. 25, No. 2.

Kindleberger pertama kali memperkenalkan teori ini dalam bukunya yang berjudul *The World in Depression, 1929-1939*. Kindleberger menyatakan bahwa sebuah kekuatan hegemoni dapat menjamin terciptanya stabilitas dalam sistem internasional. Sebaliknya, ketiadaan kekuatan hegemoni ini akan menyebabkan semakin memburuknya situasi pada saat terjadinya krisis. Kestabilan ekonomi internasional merupakan kepentingan bersama dan kerjasama dapat membantu mewujudkan kepentingan-kepentingan yang ada.⁴¹ Selain bertugas menjaga stabilitas ekonomi dan politik, sebuah kekuatan hegemon juga berperan dalam pembuatan dan pemeliharaan sebuah rezim perdagangan bebas, pembentukan sistem moneter internasional dan sebagai *lender of the last resort* untuk mencegah meluasnya dampak krisis finansial.

1.7.2 *Lender of the Last Resort (LLR)*

Lender of the Last Resort (LLR) merupakan sistem pemberian fasilitas pinjaman oleh bank sentral kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah terjadinya krisis finansial yang lebih sistemik.⁴² Adanya resiko sistemik yang dapat menimbulkan instabilitas perekonomian menyebabkan perlu adanya konsensus untuk membentuk suatu mekanisme pencegahan terjadinya krisis melalui intervensi langsung dari bank sentral.

⁴¹ Arthur A. Stein, "Hegemon's Dilemma: Great Britain, the United State and the International Economic Order" dalam *International Organization*, Vol. 38, No. 2. 1984: 365-356.

⁴² Iman Sugema & Iskandar Simorangkir, "Peranan The Lender of Last Resort (LOLR) terhadap Perekonomian: Suatu Kajian Empiris terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. 2004: 56.

Intervensi bank sentral diperlukan ketika terjadinya *market failure*. Di sektor perbankan, terdapat dua jenis *market failure*, yaitu kemungkinan terjadinya kesulitan likuiditas dan resiko gagal bayar suatu bank terhadap bank lainnya. Pemberian bantuan likuiditas merupakan pilihan terakhir setelah pasar tidak dapat memenuhi kebutuhan bank.⁴³ Dalam perkembangannya, bank sentral berperan sebagai regulator sekaligus supervisor bagi bank-bank lainnya serta bertanggungjawab menjaga stabilitas sistem keuangan. Suatu bank dapat dikatakan sebagai bank sentral apabila:

- Berfungsi sebagai bank pemerintah,
- Memiliki hak tunggal untuk mengedarkan mata uang,
- Berfungsi sebagai *Lender of the Last Resort* (LLR)

Adanya bank sentral yang menjalankan fungsi LLR dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian. Adapun fungsi dari tersebut antara lain⁴⁴:

- Mencegah terjadinya *bank run* baik yang terjadi secara individual maupun yang bersifat sistemik. Fungsi ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya panik diantara para nasabah.

Jika terjadi kepanikan diantara nasabah, maka posisi finansial sebuah bank akan ikut terganggu. Terdapat tiga solusi yang ditawarkan untuk mencegah terjadinya *bank run*, yaitu *lender of the last resort*, *suspension of convertibility* dan lembaga penjamin

⁴³ Xavier Freixas, "The Lender of Last Resort in Today's Financial Environment." Els Opuscles del CREI. 1999: 3.

⁴⁴ Jeffrey A. Miron, "Financial Panics, the Seasonality of the Nominal Interest Rate and the Founding of the Fed", American Economic Review. 1986:125-140.

simpanan (LPS).⁴⁵ Adanya LLR dan LPS berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, bahwa penarikan dana akan selalu dapat dipenuhi oleh bank.

- Mengatasi kesulitan likuiditas temporer. Fungsi ini ditujukan untuk menghindari terjadinya interupsi dalam *cash flow* suatu bank akibat tidak sebandingnya kewajiban dan kekayaan bank yang bersifat sangat jangka pendek.

Istilah *lender of the last resort* pertama kali dicetuskan oleh Sir Francis Baring dalam *Observations on the Establishment of the Bank of England* pada tahun 1797 yang menyatakan bahwa bank merupakan tempat bagi bank-bank lainnya untuk memperoleh likuiditas pada saat terjadi krisis. Namun, konsep *lender of the last resort* (LLR) baru mulai dirumuskan pada tahun 1802 oleh Hendry Thornton dalam tulisannya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. Tulisan tersebut mengidentifikasi perbedaan karakteristik dan fungsi Bank of England sebagai sebuah institusi LLR. Thornton juga menjabarkan beberapa fungsi utama LLR baik dari aspek mikroekonomi maupun makroekonomi serta menganalisis penempatan LLR dalam fungsi moneter sebuah bank sentral.⁴⁶

⁴⁵ Douglas W. Diamond & Philip H. Dybvig, "Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity", *Journal of Political Economy*. 1983: 401-419.

⁴⁶ Thomas M. Humphrey, "Lender of Last Resort: What It Is, Whence It Came and Why The Fed Isn't It" *Cato Journal*, Vol. 30, No. 2. Cato Institute. 2010: 334-335.

Thornton mengklasifikasikan tiga karakteristik bank sebagai LLR, diantaranya:

- a. Bank sebagai LLR menempati kedudukan sebagai sumber cadangan emas utama dalam sebuah sistem finansial. Bank sebagai LLR harus mampu menjaga dan mengatur stok strategis keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan emas pada saat dibutuhkan. Secara spesifik, Thornton menggambarkan Bank Inggris sebagai bank sentral yang mengelola cadangan emas dan komponen non-emas lainnya.
- b. Bank sebagai LLR bertanggung jawab sebagai pemelihara cadangan emas. Pertama, bank harus memiliki cadangan emas yang cukup untuk memperoleh kepercayaan penuh bahwa bank tersebut siap memenuhi permintaan emas pada saat dibutuhkan. Kedua, bank harus mampu melindungi cadangan emasnya agar tidak habis.
- c. Tidak seperti bank swasta yang memaksimalkan perolehan laba dan hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan konsumennya, bank sebagai LLR memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap seluruh aspek perekonomian, termasuk memberikan bantuan menyeluruh saat terjadinya krisis.

Setelah Thornton, teori LLR kemudian dikembangkan oleh Walter Bagehot. Walter Bagehot adalah seorang sejarawan ekonomi, *financial writer* dan editor *The Economist*. Pemikiran Bagehot tentang LLR juga banyak

dipengaruhi oleh ide-ide yang sebelumnya telah dicetuskan oleh Thornton. Bagehot menyatakan bahwa fungsi utama LLR adalah sebagai penyedia likuiditas saat meningkatnya permintaan uang dan mengancam tingkat harga.⁴⁷

Bagehot menekankan bahwa LLR tidak seharusnya diberlakukan secara terus menerus, namun hanya dijadikan sebagai instrument bantuan sementara saat terjadinya kepanikan perbankan. Fungsi LLR bukan untuk pencegahan awal terjadinya kepanikan finansial, namun LLR merupakan solusi untuk mencegah terjadinya gelombang kepanikan finansial berikutnya. Adanya LLR bukan untuk mencegah guncangan krisis, namun untuk meminimalisir dampak sekunder yang ditimbulkan oleh krisis keuangan. Selain itu, menurut Bagehot bank sentral memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan likuiditas di seluruh aspek perekonomian.

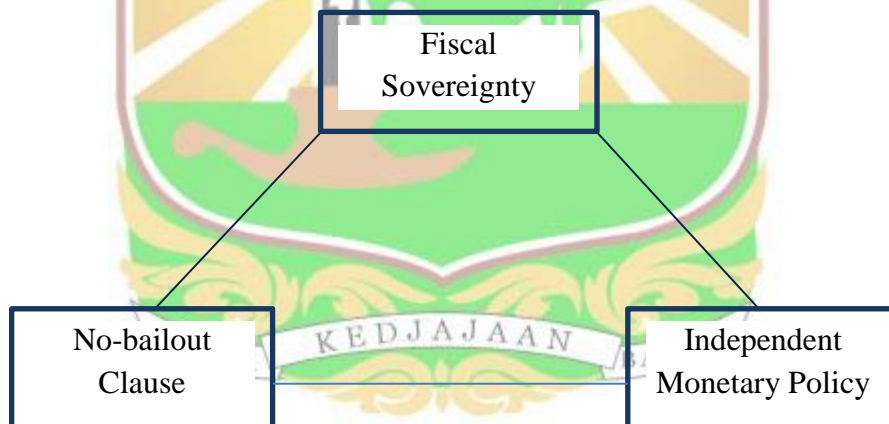
1.7.3 New Impossible Trinity of A Monetary Union

Konsep impossible trinity pada awalnya diperkenalkan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming pada tahun 1960-an. Mundell dan Fleming menyatakan bahwa negara tidak mungkin mengakomodasi tiga kebijakan ekonomi sekaligus. Tiga kebijakan itu diantaranya adalah nilai tukar mata uang tetap, keterbukaan arus modal dan kebijakan moneter yang independen. Istilah impossible trinity merujuk pada situasi dimana penerapan tiga kebijakan ekonomi sekaligus adalah sebuah kemustahilan. Sebagai konsekuensinya, satu dari tiga kebijakan tersebut harus dikorbankan atau

⁴⁷ Ibid., 344

dilonggarkan agar dua kebijakan lainnya dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, sebuah negara dapat menerapkan prinsip nilai tukar mata uang tetap dan mempertahankan kebijakan moneter indeendennya. Sebagai konsekuensinya negara tersebut akan menerapkan pengawasan yang ketat terhadap arus modal. Para pembuat kebijakan seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dalam proses pengambilan keputusan.

Sayangnya, model *impossible trinity* yang dikembangkan oleh Mundell dan Fleming tidak cocok diterapkan pada kasus krisis finansial Eropa yang menerapkan sistem moneter tunggal. Oleh karena itu, Hanno Becks dan Alloy Prinz mengembangkan konsep *new impossible trinity* sebagai berikut:



Grafik 1.1 New Trilemma Policy⁴⁸

⁴⁸ <https://archive.intereconomics.eu/year/2012/1/the-trilemma-of-a-monetary-union-another-impossible-trinity/> diakses pada 12 Oktober 2018.

- *Fiscal sovereignty* merupakan wewenang negara untuk menyusun anggaran belanja negara serta dalam hal ini negara memiliki wewenang untuk berhutang. Fiscal sovereignty merefleksikan adanya kebebasan negara untuk mengatur jumlah uang yang akan dikeluarkannya.
- Unsur kedua dalam model ini adalah kebijakan moneter independen yang dibuat oleh bank sentral suprasional. Kebijakan moneter yang diterapkan dalam sistem moneter tunggal merupakan kebijakan yang menggunakan pendekatan *one size fits all*. Dalam hal ini setiap negara anggota telah mendelegasikan kebijakan moneternya kepada bank sentral.
- Unsur ketiga dalam model ini adalah *no-bail out clause*. *No-bail out clause* merupakan komitmen untuk tidak memberikan bailout kepada negara anggota. Dalam keanggotaan Euro sendiri, klausul tanpa bailout telah diatur dalam Article 130 Perjanjian Lisbon.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan

kemanusiaan.⁴⁹ Creswell menjelaskan proses penelitian kualitatif dimulai dengan melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata (*words*), gambar-gambar atau objek. Laporan penelitian dalam metodologi ini cenderung bersifat deskriptif.⁵⁰ Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, peneliti mencoba mendeskripsikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani.

1.8.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani. Batasan waktu pengamatan dimulai dari tahun 2010 hingga 2017 untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa. Periode tersebut dipilih karena gejala krisis finansial di Yunani mulai muncul sejak tahun 2010 dan hingga tahun 2017 Yunani masih dalam pemulihan krisis dengan bantuan dari Uni Eropa.

⁴⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California SAGE Publications (2013).

⁵⁰ Umar Suryadi Bakry, "Metode Penelitian Hubungan Internasional". Pustaka Pelajar (2016): 14-20

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang aktivitas dan perilakunya akan dijelaskan dalam penelitian, sedangkan unit eksplanasi merupakan indikator yang digunakan untuk membantu menjelaskan unit analisis. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah krisis finansial yang terjadi di Yunani. Sedangkan tingkat analisis dalam penelitian ini adalah regional.

1.8.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti. Pertama, data primer yang merupakan data yang dikumpulkan melalui situs resmi Uni Eropa di www.europa.eu dan Bank Sentral Yunani di www.bankofgreece.gr. Dari kedua website resmi tersebut, peneliti mencoba mengumpulkan laporan-laporan dan dokumen-dokumen terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Yunani serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Yunani selama masa krisis. Kedua adalah data sekunder yang berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel dan berita online.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari dan mempelajari informasi melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik melalui artikel ilmiah, artikel berita, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan melalui situs resmi Uni Eropa di www.europa.eu dan Bank Sentral Yunani www.bankofgreece.gr. Data yang telah dikumpulkan melalui sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan sesuai konsep yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui dalam menganalisis data. Pada tahap pertama, data yang dikumpulkan peneliti merangkum data, memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting. Tahapan ini disebut reduksi data. Data yang dikumpulkan tersebut dapat berupa dokumen, artikel, video, hasil wawancara, teks pidato, artikel serta gambar dan foto yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data yang terdiri dari jurnal-jurnal, laporan-laporan, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di Yunani. Pada tahapan selanjutnya, data-data tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya, peneliti akan melakukan proses verifikasi atau penarikan kesimpulan secara utuh setelah semua makna yang muncul dari data diuji kebenarannya. Pada tahapan inilah diperoleh kesimpulan atas pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KRISIS FINANSIAL DI YUNANI

Bab ini menjelaskan tentang krisis finansial yang terjadi di Yunani secara lebih rinci. Dimulai dari faktor penyebab terjadinya krisis hingga dampaknya terhadap Uni Eropa.

BAB III UNI EROPA DALAM MENANGGULANGI KRISIS

Pada bab ini dijelaskan sejarah pembentukan Uni Eropa hingga dinamika kerjasama yang terbentuk di kawasan tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa untuk menanggulangi krisis finansial di kawasan tersebut.

BAB IV UPAYA UNI EROPA DALAM MENANGGULANGI KRISIS FINANSIAL DI YUNANI

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam menanggulangi krisis finansial yang terjadi di Yunani.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

